

MEDIA MASSA DAN AKTIVITAS PERJUANGAN GENDER

Erwan Baharudin¹, Ernawati²

^{1,2}Universitas Esa Unggul, Jakarta

Jalan Arjuna Utara No. 9 Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510

erwan.baharudin@esaunggul.ac.id

Abstract

Throughout history, women with various aspects of their nature have always been positioned in the private or domestic sphere. When men are positioned in public spaces. This difference in position has led to the growth of values in society that those who play a role in the public sphere have status as first-class citizens, while those who play a role in the private sphere (domestic) have the status of second-class citizens. This is a practice of gender inequality. However, now this is not the case with the development of media technology which has led to increasingly rapid changes in the concept of media that are continuing. An interesting development that will be analyzed by trying to see how the media has an important role in spreading women's issues. The women's issues in question are issues that have a direct impact on women from all aspects. The existence of the media at this time is very strong influence on changes in society and social. The role of the media as a provider of information in turn encourages the development of the women's movement in Indonesia. This is where the author is interested in discussing how women make media activities for the struggle for gender equality. This study aims to describe how the media has become very important for the struggle of Indonesian women to have the same rights as men in accordance with the mandate of the 1945 Constitution.

Keywords: *Women, media, gender, technology*

Abstrak

Dalam sejarah sepanjang masa, perempuan dengan berbagai aspek kodratnya selalu diposisikan dalam ruang privat atau domestik. Manakala laki-laki diposisikan dalam ruang publik. Perbedaan posisi semacam ini telah menyebabkan tumbuhnya nilai di masyarakat bahwa kodrat yang berperan dalam ruang awam (public sphere) statusnya adalah sebagai warga negara kelas satu, manakala yang berperan dalam ruang privat (domestic) berstatus warga negara kelas dua. Ini adalah praktek dari ketidakadilan gender. Namun hal itu, kini tidaklah demikian dengan perkembangan teknologi media menyebabkan semakin cepatnya perubahan konsep tentang media yang terus berlanjut. Perkembangan menarik yang akan dianalisis dengan mencoba melihat bagaimana media memiliki peran penting dalam menyebarkan isu perempuan. Isu perempuan yang dimaksud adalah isu yang memiliki dampak langsung terhadap perempuan dari segala aspek. Keberadaan media pada saat ini sangatlah memberikan pengaruh yang kuat terhadap perubahan di dalam masyarakat dan sosial. Peran media sebagai pemberi informasi pada gilirannya mendorong perkembangan gerakan perempuan di Indonesia. Disinilah penulis tertarik untuk membahas bagaimana perempuan menjadikan media aktivitas perjuangan kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana media menjadi sangat penting bagi perjuangan perempuan Indonesia agar mempunyai hak yang sama dengan laki-laki sesuai dengan amanah UUD 1945.

Kata Kunci: Perempuan, media, gender, teknologi

Pendahuluan

Perkembangan era globalisasi salah satunya ditandai dengan kemajuan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi informasi. Komunikasi dilakukan dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk melakukan interaksi dengan orang lain terkait fungsi manusia sebagai makhluk sosial (Lubis, 2014). Perkembangan media massa di Indonesia meningkat pesat khususnya setelah masa reformasi (Herawati, 2016). Dan media massa dianggap faktor yang mempengaruhi terbentuknya ideologi yang kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai suatu hal yang lumrah. Memang media massa bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh, tetapi media massa telah

berkembang menjadi agen sosialisasi yang semakin menentukan karena intensitas masyarakat mengkonsumsinya (Juditha, 2015).

Efek media juga akan semakin kuat mengingat sosok perempuan yang ditampilkannya adalah cara yang memperkuat stereotip yang sudah terbangun di tengah masyarakat. Karenanya media massa memang bukan yang melahirkan ketidaksetaraan gender tetapi ikut serta memperkuat, melestarikan, bahkan memperburuk ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat. Apa yang bisa kita lihat di sini bahwa peran media massa tidak bisa dipandang enteng. Bukan saja mengajarkan ideologi tersebut, tetapi juga

meneguhkan apa yang sudah terbangun serta memberi pembenaran, bahkan mendukung kondisi yang memfasilitasi praktik-praktik penindasan perempuan. Bahkan jika kita ingin menarik efek media secara jauh maka kasus-kasus perkosaan atau kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi akibat media massa (Juditha, 2015).

Konsep gender pertama kali harus dibedakan dari konsep seks atau jenis kelamin secara biologis. Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan; sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan (Bahan Informasi Pengarusutamaan Gender, 2002). Melalui penentuan jenis kelamin secara biologis ini maka dikatakan bahwa seseorang akan disebut berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki penis, jakun, kumis, janggut, dan memproduksi sperma. Sementara seseorang disebut berjenis kelamin perempuan jika ia mempunyai vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, memiliki alat untuk menyusui (payudara) dan mengalami kehamilan dan proses melahirkan. Ciri-ciri secara biologis ini sama di semua tempat, di semua budaya dari waktu ke waktu dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Meskipun demikian, upaya untuk mendefinisikan konsep gender tetap dilakukan dan salah satu definisi gender telah dikemukakan oleh Joan Scoot, seorang sejarawan, sebagai “a constitutive element of social relationships based on perceived differences between the sexes, and...a primary way of signifying relationships of power.” (Astuti and Komunikasi, 2016).

Perwujudan konsep gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, misalnya jika dikatakan bahwa seorang laki-laki itu lebih kuat, gagah, keras, disiplin, lebih pintar, lebih cocok untuk bekerja di luar rumah dan bahwa seorang perempuan itu lemah lembut, keibuan, halus, cantik, lebih cocok untuk bekerja di dalam rumah (mengurus anak, memasak dan membersihkan rumah) maka itulah gender dan itu bukanlah kodrat karena itu dibentuk oleh manusia. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequality). Namun timbul persoalan dimana perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, walaupun laki-laki tidak menutup kemungkinan akan menjadi korban ketidakadilan gender tetapi

perempuan masih tetap menduduki posisi tertinggi sebagai korban ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender antara lain seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotype atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, sosialisasi ideologi nilai peran gender (Astuti and Komunikasi, 2016).

Sedangkan menurut feminis radikal libertarian Gayle Rubin, sistem seks/gender adalah suatu rangkaian pengaturan, yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia. Sehingga sebenarnya antara seks dan gender itu berbeda. Tetapi bukan hanya berbeda, seks dan gender juga memiliki kesamaan dalam basis biologis pada seks, dan keduanya merupakan konstruksi sosial, tetapi mereka juga berbeda karena terbentuk dari basis sosial yang berbeda. Gender juga merupakan suatu konstruksi budaya yang sifatnya terbuka bagi segala perubahan (Juditha, 2015). Terbentuknya perbedaan gender melalui proses yang sangat panjang, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosio-kultural bahkan melalui ajaran keagamaan maupun negara (Aisyah, 2013). Anggapan- anggapan budaya tersebut, dengan sendirinya memberikan peran lebih luas kepada laki-laki dan pada saatnya laki-laki memperoleh status lebih tinggi dari perempuan dalam struktur sosial sehingga relasi gender antara keduanya menjadi tidak setara atau timpang dan menimbulkan persoalan bias gender. Bias gender adalah pandangan yang membedakan peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bahkan negara. Persoalan bias gender inilah yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotype, beban ganda dan tindak kekerasan terhadap perempuan (Aisyah, 2013). Penggunaan media saat ini dinilai mempunyai peran penting dalam mencoba mengangkat isu-isu mengenai ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dari aspek yang esensial dalam pandangan kritis yaitu upaya pemahaman atas kondisi sosial yang tertindas (under represented groups) dan bertindak (advokasi) mengatasi kekuatan yang menindas, dalam rangka memperjuangkan emansipasi wanita dan partisipasi masyarakat. Secara

operasional, studi ini berusaha menggambarkan proses analisis wacana kritis mengenai perjalanan aktivitas perjuangan perempuan dalam mengangkat isu-isu perempuan dalam dunia media. Media massa memainkan peran penting dalam menyebarkan isu-isu perempuan. Dengan terbukanya kesempatan bagi media massa untuk mengekspos wacana yang sebelumnya hampir tidak pernah dibicarakan orang. Pembahasan akan diakhiri dengan melihat bagaimana atmosfer kesempatan politik yang mendukung, media massa berperan besar sebagai sumber aspirasi inspirasi dan sekaligus sebagai media bagi aktivitas gerakan perempuan untuk terus menyuarkan isu-isu perempuan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam sejarah perkembangannya, di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan-gerakan wanita (feminisme) mulai menjamur di berbagai tempat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia seperti yang dipelopori oleh R.A. Kartini. Mereka bekerja untuk emansipasi, perubahan dan persamaan kedudukan wanita, dan keadilan sosial selama kurun waktu tersebut. Alasan dan tujuan di balik perjuangan mereka ini sangat beragam. Revolusi melawan kekuatan kolonial, misalnya, juga sering menggunakan kemampuan dan kekuatan wanita. Cita-cita kemanusiaan dan hak pilih universal tersebar lewat sistem komunikasi yang sudah cukup banyak berkembang saat itu (Lubis, 2006).

Kondisi perempuan yang masih memprihatinkan memang tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia secara umum yang cukup lama mengalami kehidupan dalam kungkungan rezim otoriter. Hanya dalam penggalan-penggalan sejarah kita sedikit menikmati kehidupan demokratis yang pro kebebasan atas pilihan rakyat. Sebab selebihnya rakyat memang hidup dalam hegemoni dan kooptasi rezim yang mengatasmakan negara. Kekuasaan yang sentralistik, hukum yang dijadikan alat legitimasi politik untuk mempertahankan status quo, perekonomian yang dikuasai segelintir orang, militer yang tidak berpihak kepada rakyat, dan lainnya. Pada masa Orde Baru kaum perempuan Indonesia sebagaimana halnya warga Indonesia lainnya menjadi terkotak-kotak dari segi ideologis karena keanggotannya dalam berbagai organisasi yang berafiliasi dengan berbagai partai politik.

Sudut pandang yang muncul dari Pemerintah Orde Baru adalah situasi seperti ini tidak menguntungkan baik dari segi kepentingan perempuan sendiri maupun kepentingan

pembangunan nasional. Terkotak-kotaknya perempuan dalam berbagai ormas perempuan telah membuat perempuan dinilai terlalu terlibat dalam perjuangan politik dan melupakan kegiatan lain yang langsung bermanfaat bagi pengembangan kesejahteraan hidup mereka. Keragaman ormas perempuan itu juga dinilai mengganggu kerukunan politik antar perempuan Indonesia. Inilah pola pandang Orde Baru. Pertimbangan politik rezim Orde Baru saat itu adalah mencegah agar perempuan menjadi alat bagi masuknya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Pertimbangan inilah yang melatarbelakangi lahirnya ormas-ormas perempuan yang dibidani Pemerintah. Maka di masa Orde Baru, gambaran posisi perempuan sangat transparan. Ada organisasi-organisasi seperti PKK, Dharma Wanita, yang secara khusus mengarahkan peran perempuan untuk mendukung target pembangunan. Salah satu contoh kasus di sini adalah program KB yang mengalkulasi kepatuhan tubuh perempuan untuk dipasang alat kontrasepsi. Organisasi Kowani yang semula merupakan pejuang-pejuang pioner isu-isu perempuan dibelokkan oleh negara untuk mendukung apa yang disebut Julia Suryakusuma sebagai ideologi Ibuisme.

Kecurigaan terhadap Orde Baru ini sangat beralasan. Sebab organisasi ini pada ujungnya berinduk kepada birokrasi dan tidak mempunyai kesempatan menjadi kekuatan lobi perempuan. Pimpinan organisasi perempuan di masa Orde Baru juga harus dikaitkan dengan struktur pimpinan dinas pemerintahan. Praktis, perempuan ideal di masa Orde Baru ditafsiri sebatas kelompok yang mendukung karier suami, menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan melahirkan anak-anak bangsa. Kedudukannya sebagai warga negara tidak mendapatkan prioritas utama. Ruang publik yang tak ubahnya ruang privat. Sehingga jelas bahwa Orde Baru bersikap ganda; satu sisi memberikan ruang publik dengan membuka kesempatan perempuan masuk ke dalam pasar tenaga kerja upahan, dan kemampuan untuk bersaing dengan laki-laki. Sedangkan di sisi lain Orde Baru makin memperkuat sistem patriarkis dengan menempatkan perempuan sebagai penopang kesuksesan laki-laki. Padahal secara ideal Orde Baru seharusnya mendorong perkembangan suatu struktur patriarkis ke struktur keluarga egalitarian (Kumalasari, 2016). Permasalahan perempuan masa kini masih menunjukkan sebagian gambaran permasalahan masa lalu yang belum terselesaikan. Seperti telah dikemukakan di atas, masalah kini semakin

kompleks, berbagai permasalahan yang muncul merupakan senyawa dari masalah lokal/internal dan global/eksternal (Djoeffan, 2001).

Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat melalui proses yang panjang serta bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas sesuai perkembangan zaman. Peran gender sendiri diartikan sebagai ide-ide kultural yang menentukan harapan-harapan pada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam masyarakat (Aisyah, 2013). Gender dimaknai sebagai konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Usaha memaparkan ideologi gender yang beroperasi di Indonesia adalah hal yang tidak mudah dan perlu kecermatan untuk memahaminya. Indonesia merupakan bangsa multikultur, yang terdiri dari 740 grup etnis—tiap etnis dengan budaya mereka sendiri, 583 bahasa, tersebar di 6 pulau besar dan 17,000 pulau kecil. Bangsa ini juga merupakan komunitas muslim terbesar di Dunia (Herawati, 2016).

Di Indonesia citra ideal perempuan adalah ibu yang baik sehingga sering ditambahkan nuansanya menjadi ibu bangsa dsb. Penekanan ibu, keluarga dan kesejahteraan dibakukan melalui pembentukan Kemertanian Muda Urusan Wanita, pada tahun 80-an. Dengan demikian pada masa itu tidak relevan untuk membahas masalah kesetaraan gender apalagi masalah feminisme. Penekanan seperti bahkan didengungkan sebagai perbedaan antara feminisme Indonesia dengan feminisme yang berkembang di Barat (Santoso, 2010).

Gerakan feminisme merupakan gerakan konflik sosial yang dimotori oleh para pelopor feminisme dengan tujuan mendobrak nilai-nilai lama (patriarkhi) yang selalu dilindungi oleh kokohnya tradisi struktural fungsional. Gerakan feminisme modern di Barat dimulai pada Tahun 1960-an yaitu pada saat timbulnya kesadaran perempuan secara kolektif sebagai golongan tertindas (Skolnick 1987; Porter 1987). Menurut Skolnick: Some feminists denounced the family as a trap that turned women into slaves (beberapa feminis menuduh keluarga sebagai perangkap yang membuat para perempuan menjadi budak-budak). Gerakan feminisme yang berdasarkan model konflik berkembang menjadi gerakan-gerakan feminisme liberal, radikal, dan

sosialis atau Marxisme (Anderson 1983). Berdasarkan berbagai literatur dapat disimpulkan bahwa filsafat feminisme sangat tidak setuju dengan budaya patriarkhi. Budaya patriarki yang berawal dari keluarga yang menjadi penyebab adanya ketimpangan gender di tingkat keluarga yang kemudian mengakibatkan ketimpangan gender di tingkat masyarakat. Laki-laki yang sangat diberi hak istimewa oleh budaya patriarki menjadi sentral dari kekuasaan di tingkat keluarga. Hal inilah yang menjadikan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi kaum perempuan dalam kepemilikan properti, akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan akhirnya kurang memberikan manfaat secara utuh bagi eksistensi perempuan (Puspitawati, 2013).

Salah satu penyebabnya adalah telah berakarnya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dari sisi adat, norma ataupun struktur masyarakatnya. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi masyarakat yang belum sadar gender mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan pendidikan, akan terbuka peluang bagi mereka untuk menjadi lebih bermartabat dan sejahtera. Setelah Indonesia merdeka, kaum perempuan tidak pernah berhenti berjuang bersama kaum laki-laki dalam mengisi kemerdekaan. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta maupun masyarakat, sangat tergantung dari peran laki-laki dan perempuan (Taher and Vitayala, 2009).

Transformasi dan partisipasi perempuan dituntut lebih aktif sejak kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No.9/2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Dengan terbitnya Inpres ini, pemerintah diharuskan mereformulasi kebijakan yang bias gender menjadi responsif gender dan ini tercermin dalam program/proyek/kegiatan di berbagai bidang pembangunan. Berdasarkan Inpres No. 9/2000 disebutkan bahwa gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan

perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan juga keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dengan definisi tersebut maka perempuan, selain juga laki-laki, diharapkan dapat ikut serta secara aktif berkiprah dalam pembangunan sesuai dengan kemampuannya, jadi bukan berarti memberikan pengecualian ataupun kuota, khususnya pada perempuan. Strategi yang harus ditempuh agar kebijakan pembangunan nasional responsif gender adalah melalui pengarusutamaan gender. Oleh karena itu, melalui Inpres No. 9 tahun 2000, ditegaskan bahwa strategi pengarusutamaan gender adalah sebagai salah satu strategi pembangunan nasional (Taher and Vitayala, 2009).

Media dalam Mengangkat Isu Perempuan

Media massa memiliki peran besar dalam mengembangkan dan menyebarkan wacana dan peristiwa internasional. Isu, wacana dan peristiwa yang berkembang atau terjadi di sebuah negara dengan cepat akan menyebar ke Negara-negara lain berkat pemberitaan media massa. Peristiwa yang bisa diangkat sebagai contoh adalah maraknya aksi gerakan mahasiswa di berbagai kota di Indonesia pada akhir 1980-an dan terutama pada tahun 1990-an. Berkembangnya aksi-aksi gerakan mahasiswa Indonesia tersebut tidak lepas dari peran media massa dalam memberitakan kebangkitan gerakan mahasiswa di Philipina yang menuntut Ferdinand Marcos mundur dari jabatannya pada tahun 1986 dan aksi gerakan mahasiswa Cina dilapangan Tiananmen Cina pada tahun 1989 menentang pemerintahan sosialis dan menuntut pemerintahan yang demokratis. Peristiwa-peristiwa dan isu-isu yang diangkat oleh gerakan mahasiswa di dua negara tersebut yang kemudian disebarluaskan melalui pemberitaan media massa telah mendorong para aktivis mahasiswa di Indonesia untuk melakukan aksi serupa (Dewi, 2009).

Muncul fenomena maraknya tayangan isu-isu perempuan oleh media massa, baik surat kabar, majalah, televisi maupun film. Kompas, Suara Pembaruan dan Suara Merdeka merupakan beberapa contoh media massa surat kabar yang sering memuat isu dan wacana tentang perempuan. Fenomena ini menarik mengingat isu-isu perempuan, terutama yang bernuansa feminis nyaris tidak bisa ditemui di media massa pada periode sebelum akhir 1990-an ketika itu Indonesia masih dipimpin oleh

Soeharto yang cenderung mengambil kebijakan menempatkan perempuan di sektor domestik sebagai isteri yang mengabdikan pada suami atau ibu yang setia menjaga keluarga dibandingkan sebagai pribadi yang memiliki otonomi. Di sini terlihat peran media massa amatlah besar sebagai wahana untuk menyuarakan isu-isu dan kepentingan perempuan (Dewi, 2009). Media massa dengan kekuatannya telah menjadi alat kontrol sosial dan konstruksi sosial yang sangat ampuh. Dan selanjutnya perempuan menjadi penonton dengan apa yang disebut Boudrillard sebagai silent majority yang tidak akan mampu berlutik dan hanya mampu menerima dengan nrimo. Televisi menjadi bagian hidup yang selalu mengatur tata kehidupan dan relasi sosial dimanapun kita berada serta menjadi acuan nyata yang membuat perempuan terpukau dan diam seribu bahasa menerima apa saja yang ditawarkan olehnya (Lubis, 2014).

Semangat UUD 1945 yang menjamin hak setiap warganegara berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. RUU terkait keadilan dan kesetaraan gender yang telah digulirkan saat ini diharapkan juga dapat mendorong terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang, seperti, sektor ekonomi, sektor politik dan pengambilan keputusan, sektor sosial, sektor perlindungan perempuan. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai unsur yang menyebabkan ketidak setaraan antara perempuan dan laki-laki masih tetap ada. Isu kesetaraan gender sebenarnya telah terefleksikan di dalam RPJMN 2010-2014 yang mencakup upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui pemenuhan 3 (tiga) unsur, yaitu: Meningkatkan kualitas hidup, akses dan peran perempuan dalam segala bidang (Hasan, 2019).

Fenomena realita kekerasan (violence) ini sesungguhnya kontra produktif/bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila yaitu 'Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab', di mana deskripsi dari konsep sila tersebut lebih mengedepankan pada pengakuan publik untuk memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; pengakuan atas persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan-bedakan agama, kepercayaan, jenis kelamin/gender, warna kulit, keturunan, suku dan kedudukan sosial; serta konsep sila ini menitikberatkan pada pengembangan sikap saling mencintai sesama manusia. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan lemahnya perlindungan hukum bagi wanita korban di

Indonesia, kemungkinan dikarenakan eksistensi dari adanya sistem budaya patriarkal di masyarakat, di mana sistem pranata sosial ini mendasarkan pada relasi yang timpang menurut kategori kuat-lemah, pihak yang kuat menguasai dan menindas pihak yang lemah ataupun sistem budaya sosial yang memarjinalkan posisi wanita secara tetap di masyarakat, di mana seolah-olah melegitimasi berbagai macam ketidakadilan, perampasan dan penindasan yang dilakukan pelaku atas hak asasi wanita korban (Setiawan, 2011).

Isu perempuan adalah isu yang memiliki dampak langsung terhadap perempuan. Cakupan isu perempuan di antaranya adalah hak reproduksi, persoalan perawatan anak, masalah ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, HAM, pendidikan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kesehatan dan agama. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa isu perempuan amatlah beragam, mulai dari persoalan-persoalan yang berkait dengan kehidupan pribadi sebagai perempuan hingga persoalan yang lebih bersifat publik. Isu-isu perempuan yang diekspos media massa amat beragam. Bukan saja karena isu perempuan tidaklah tunggal, tetapi juga karena ekspos media massa amat terkait dengan wacana populer yang sedang banyak dibincang oleh masyarakat. Salah satu isu perempuan yang populer dimasyarakat dan pernah disorot oleh media massa adalah posisi perempuan yang masih terpinggirkan dibidang politik. Isu ini mendapat perhatian dari berbagai surat kabar terutama menjelang pemilu tahun 2004 dan kembali berulang pada tahun 2009 ketika saat itu kuota keterwakilan perempuan ramai disuarakan oleh para aktivis perempuan. Isu lain yang juga banyak diangkat media massa adalah kekerasan terhadap perempuan. Isu ini mendapat perhatian media massa, baik media cetak maupun elektronik karena semakin banyak fenomena kekerasan terhadap perempuan yang terungkap, padahal Undang-Undang (UU) Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah disahkan dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan telah gencar dilakukan para aktivis perempuan (Dewi, 2009). Keterpurukan posisi perempuan yang diderita oleh perempuan dalam pengambilan peran publik adalah sebagai akibat dari perbedaan gender yang sudah mengakar dalam sosio- kultural masyarakat. Perlakuan yang menempatkan perempuan dengan tugas domestik telah menjadikan perempuan tidak memiliki keahlian, sumber daya dan akses yang lebih dibanding laki- laki (Zamroni, 2013).

Tidak saja isu-isu global mengenai HAM dan demokrasi, dalam fungsinya sebagai pemberi informasi media massa juga telah berperan penting dalam menyebarkan wacana tentang perempuan. Media massa aktif meliput dan memberitakan hasil-hasil konperensi perempuan internasional. Informasi yang dibawa oleh media massa sejak konperensi di Meksiko City tahun 1975 hingga Beijing tahun 1995 mengilhami kaum perempuan diberbagai negara mendirikan organisasi perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan (Dewi, 2009).

Media massa berfungsi menyampaikan fakta. Karena itu, gambaran perempuan dalam media massa merupakan cermin realitas yang ada dalam masyarakatnya. Mengharapkan setara dalam segala sesuatu adalah sebuah utopia. Meskipun, kaum wanita bisa saja berdalih itu adalah cita-cita dan perjuangan. Ketimbang mempersoalkan terus-menerus mengenai. Kesetaraan gender, feminis-maskulin, alangkah lebih baiknya jika perempuan lebih menunjukkan prestasi, karya, kecakapan dan peran dalam masyarakat yang tidak kalah dengan kaum laki-laki.

Sehingga, gambaran ideal tentang perempuan pun akan tampil dalam media massa (Handoyo, 2013). Keadilan gender yang ingin dicapai dalam pembangunan berkelanjutan berupa jaminan akses secara menyeluruh terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan dan peluang ekonomi. Untuk itu langkah di lakukan adalah: Mengamankan hak-hak asal wanita dan anak serta mengakhiri seluruh kekerasan yang menimpa mereka. Mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam seluruh aspek ekonomi, politik, sipil, social dan budaya. Perlu kesadaran tentang laki-laki dan perempuan yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan sepadan (Hasan, 2019).

Kesimpulan

Media massa memiliki peran besar dalam mengembangkan dan menyebarkan wacana dan peristiwa. Selain berfungsi menyampaikan fakta, dimana media dapat digunakan sebagai bekal untuk masuk dalam arena perjuangan tanda dimana perempuan harus mampu merebut makna. Hal ini perlu dilakukan agar yang berhubungan dengan perempuan tidak lagi ditempatkan dalam posisi marjinal terus menerus. Bahwa perjuangan gender adalah perjuangan mengubah relasi memandang dan dipandang. Artinya, perempuan harus lebih mengarah pada political subject daripada political object karena dengan demikian ia punya komitmen

atas perubahan yang lebih baik bagi dunia dan peletakan sejarahnya sendiri. Dan mengesampingkan anggapan-anggapan budaya yang terbentuk untuk memberikan peran lebih luas kepada perempuan dan pada saatnya memperoleh hak yang sama dalam struktur sosial sehingga relasi gender antara keduanya menjadi setara atau tidak timpang dalam memaknai persoalan bias gender.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N. (2013) 'Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)', *MUWAZAH*, 5(2), pp. 203–224.
- Astuti, Y. D. and Komunikasi, P. J. (2016) 'Media Dan Gender (Studi Deskriptif Representasi Stereotipe Perempuan dalam Iklan di Televisi Swasta)', 09, pp. 25–32.
- Dewi, M. A. (2009) 'Media massa dan penyebaran isu perempuan', 7(2).
- Djoeffan, S. H. (2001) 'Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang', *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Bandung Islamic University, 17(3), pp. 284–300.
- Handoyo, P. (2013) 'Representasi Perempuan dalam Media', pp. 137–142.
- Hasan, B. (2019) 'Gender Dan Ketidak Adilan', *Jurnal Signal*, 7(1), pp. 63–86.
- Herawati, M. (2016) 'Pemaknaan Gender Perempuan Pekerja Media Di Jawa Barat Maimon Herawati * Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran ABSTRAK', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(1), pp. 84–94.
- Juditha, C. (2015) 'Gender dan Seksualitas dalam Konstruksi Media Massa', *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 1(1).
- Kumalasari, L. D. (2016) 'Politik Perempuan Berbasis Gender', *Community*, 2(3), pp. 286–297.
- Lubis, E. E. (2014) 'Potret media sosial dan perempuan', *Jurnal PARALELLA*, 1(2), pp. 97–106.
- Lubis, S. (2006) 'Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad 21', *Jurnal Demokrasi*, 5(1).
- Puspitawati, H. (2013) 'Konsep, teori dan analisis gender', Bogor: Departemen Ilmu Keluarga Dan Kon-Sumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian.
- Santoso, W. M. (2010) 'Identitas, politik tubuh perempuan dan media televisi', V(1), pp. 75–90.
- Setiawan, Y. B. (2011) 'Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan', 2(1), pp. 13–20.
- Taher, A. and Vitayala, A. (2009) 'Persepsi Mahasiswa Terhadap Kesadaran Gender', *Jurnal Penyuluhan*, 5(2). Zamroni, M. (2013) 'Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender', XIV(1), pp. 103–132.